**KEJAHATAN TERORGANISIR DALAM PERDAGANGAN FAUNA LANGKA:
KAJIAN ATAS KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN HUKUM PIDANA
SERTA PENEGAKANNYA DI INDONESIA**

Agus¹, Aditiarman²

^{1,2}Universitas Jambi

agus08@unja.ac.id¹, aditiarmankrc@gmail.com²

ABSTRACT: *Illegal trade in endangered fauna is a serious threat to biodiversity in Indonesia, especially in conservation areas such as Kerinci Seblat National Park (TNKS). This study examines the environmental and criminal law policies in force in Indonesia, as well as the effectiveness of law enforcement in dealing with organized crime related to the trade in endangered fauna. Although existing regulations such as Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment have regulated the protection of endangered fauna, this study found that its implementation in the field still faces various challenges, including weak coordination between law enforcement agencies, lack of human resources and technology, and limitations in enforcing criminal sanctions. Using the “deterrence theory” and “collaborative governance theory” approaches, this study analyzes how criminal sanctions and cross-sectoral cooperation can improve the effectiveness of law enforcement against organized crime. The results of the study show that although the criminal sanctions regulated are quite strict, their effectiveness is still weak due to the lack of certainty of enforcement and low collaboration between agencies. This study also highlights the importance of the role of local communities (Customary Institutions) and monitoring technology to support conservation efforts for rare fauna in the TNKS area. This study provides strategic recommendations to strengthen law enforcement through increased coordination between institutions, the use of more sophisticated monitoring technology, and expanding international cooperation to address organized crime networks operating across countries. With these steps, it is hoped that protection of rare fauna can be more effective, while also making a positive contribution to the preservation of Indonesia's biodiversity.*

Keywords: *Organized Crime, Trade In Endangered Fauna, Criminal Law, Environmental Law, Deterrence And Collaborative Governance.*

ABSTRAK: Perdagangan fauna langka yang dilakukan secara ilegal merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum lingkungan dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan terorganisir terkait perdagangan fauna langka. Meskipun regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur perlindungan satwa langka, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta keterbatasan dalam penegakan sanksi pidana. Dengan menggunakan pendekatan “*teori deterrence*” dan “*teori collaborative governance*”, penelitian ini menganalisis bagaimana sanksi pidana dan kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana yang diatur sudah cukup tegas, efektivitasnya masih lemah karena kurangnya kepastian penegakan dan rendahnya kolaborasi antar-lembaga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal (Lembaga Adat) dan teknologi pemantauan untuk mendukung upaya konservasi fauna langka di kawasan TNKS. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih, serta memperluas kerja sama internasional untuk mengatasi jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap fauna langka dapat lebih efektif, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia

Kata Kunci: Kejahatan Terorganisir, Perdagangan Fauna Langka, Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, Deterrence Dan Collaborative Governance.

PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan masalah serius yang mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang kaya akan fauna langka seperti harimau Sumatra sebagai top predator, trenggiling, kura-kura hidung babi dan lain-lain merupakan satwa yang dilindungi. Satwa-satwa ini menghadapi ancaman kepunahan yang semakin meningkat akibat tingginya permintaan pasar internasional serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Shepherd et al., 2020). Perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem tetapi juga merugikan negara secara ekonomi dan mengurangi reputasi internasionalnya (Gian E et al., 2020).

Banyak fauna langka diperdagangkan secara ilegal karena memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti untuk bahan obat, hiasan, atau sebagai hewan peliharaan eksotis (Roe, 2019). Sedangkan menurut UNODC. (2020) Perdagangan fauna langka memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup spesies tertentu. Aktivitas ini seringkali mengakibatkan

penurunan populasi di habitat aslinya dan berisiko menyebabkan kepunahan jika tidak dikontrol dengan baik. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022) banyak spesies satwa liar, seperti harimau, badak, dan gajah, terancam punah karena perburuan dan perdagangan ilegal. Kemudian dipertegas oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). (2020) Perdagangan fauna langka memberikan dampak besar terhadap keanekaragaman hayati. Menurut BKSDA, kegiatan ini menyebabkan penurunan populasi satwa-satwa langka di habitat alamnya, bahkan mengakibatkan beberapa spesies mengalami kepunahan lokal (BKSDA, 2020).

Sama halnya dengan penangkapan satwa dan dibukanya lahan kawasan baru secara ilegal yang pada substansinya adalah habitat dari fauna langka di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang berfungsi sebagai kawasan hutan tropis dan paru-paru dunia. TNKS, yang mencakup wilayah Desa Renah Pemetik di Kerinci, adalah salah satu kawasan konservasi penting yang menjadi habitat lebih dari 4.000 jenis flora dan 350 jenis fauna, termasuk spesies langka seperti harimau Sumatra, trenggiling, dan kura-kura hidung babi. Keberadaan TNKS yang telah diakui sebagai World Heritage menuntut adanya upaya perlindungan maksimal terhadap satwa langka yang ada di dalamnya. Jeremy H et al. (2003) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan konservasi terbesar yang menjadi habitat bagi tapir Asia (*Tapirus indicus*).

Hasil survei keanekaragaman hayati selama tiga tahun menunjukkan bahwa TNKS merupakan salah satu kawasan penting yang masih tersisa bagi kelangsungan hidup tapir Asia. Bukti keberadaan tapir diperoleh melalui penggunaan kamera jebak, pencatatan tanda-tanda kehadiran tapir, serta wawancara dengan masyarakat setempat. Kamera jebak dipasang di empat lokasi yang masing-masing mewakili jenis hutan yang berbeda. Satwa kunci lainnya yang dilindungi adalah harimau Sumatera sebagai top predator yang berperan penting dalam menyeimbangkan ekosistem di Indonesia. “Selain itu, masalah penegakan hukum sering kali diperparah oleh jaringan kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan baik, yang memanfaatkan celah dalam regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk menangani masalah ini.”

Sedangkan menurut Reko D. S. (2018) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah area konservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan telah diakui secara global sebagai Situs Warisan Dunia. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah taman nasional

terbesar di Sumatra hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/KPTS-V/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pada tanggal 14 Oktober 1999 yang menetapkan Kawasan Taman Nasional seluas 1.375.347.867 ha yang mencakup Desa Renah Kemumu dan Desa Tanjung Kasri. (Wikipedia.com di akses 14 Oktober 2024). Sejak ditetapkannya kedua desa tersebut di atas sebagai Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, maka secara yuridis formal, Kementerian Kehutanan telah mengklaim wilayah tersebut adalah sebagai kawasan hutan yang dilarang bagi siapapun untuk melakukan kegiatan apapun tanpa izin Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pengelolaan TNKS dilakukan oleh pemerintah dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat. Namun, upaya perlindungan TNKS sering kali diabaikan. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menjaga TNKS, seperti aktivitas penebangan liar, pembakaran, kerusakan ekosistem, dan pemburuan fauna langka yang kemudian diperjualbelikan di dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah mengenai perlindungan TNKS dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (Reko D. S. 2018).

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat perlindungan terhadap fauna langka melalui sanksi pidana yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik antar- lembaga.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi perdagangan fauna langka dan kerusakan ekosistem pada kawasan lingkungan, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan khusus yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya sumber daya untuk memantau aktivitas pemusnahan fauna langka, serta terbatasnya penerapan sanksi pidana yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan (Lee et al., 2005; Adhiasto et al., 2023). Keberadaan sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara juga memperumit upaya pemberantasan perdagangan ilegal tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan bersinergi.

Penelitian ini menggunakan teori “*deterrence*” dan teori “*collaborative governance*” untuk memecahkan masalah yang ada. Teori “*deterrence*” menyatakan bahwa penerapan hukuman yang berat dan pasti dapat mencegah individu atau kelompok untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini perdagangan fauna langka. Penerapan sanksi pidana dan denda

ekonomi dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku (Thaharah, 2023). Sementara itu, teori “*collaborative governance*” menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi internasional dalam menangani masalah lintas negara, yang relevan dalam konteks perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia (Jiao et al., 2021).

Meskipun regulasi telah diperkuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian ini menemukan beberapa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Pertama, efektivitas sanksi pidana masih rendah karena kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, yang mengakibatkan banyak pelanggar tidak ditindak dengan tegas. Kedua, kerjasama antar- lembaga pemerintah dan organisasi internasional masih terbatas, yang mengakibatkan adanya celah dalam pengawasan dan penindakan terhadap jaringan perdagangan satwa liar lintas negara (Lubis, 2017; Broussard, 2017). Penelitian ini mengusulkan solusi berupa penguatan koordinasi melalui mekanisme “*task force*” khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas teknologi pemantauan untuk melacak pergerakan satwa liar ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka dan Hukum Lingkungan di Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya menilai efektivitas penerapan hukum pidana, tetapi juga mengkaji peran kerjasama lintas sektor (lembaga) dan teknologi pemantauan dalam mengurangi perdagangan satwa liar ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana integrasi antara sanksi pidana dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah terkait penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dan peran kebijakan dalam menangani kejahatan terorganisir. Studi ini juga memberikan perspektif baru dalam

penerapan teori deterrence dan collaborative governance pada kasus kejahatan satwa liar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis : Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat upaya pemberantasan perdagangan satwa liar. Penelitian ini juga dapat membantu dalam menyusun kebijakan strategis yang lebih efektif untuk mengurangi ancaman terhadap fauna langka.
3. Manfaat Sosial dan Ekologis : Dengan memperkuat penegakan hukum dan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, penelitian ini berkontribusi pada perlindungan spesies yang terancam punah dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya keseimbangan ekosistem yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia, serta memberikan arah kebijakan yang lebih baik dalam melindungi kekayaan fauna langka yang dimiliki negara ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna liar ilegal telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Negara ini khususnya di habitat alamiah para fauna langka yang menjadi rumah bagi berbagai spesiesnya yang memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti harimau Sumatra sebagai top predator, trenggiling, dan kura-kura hidung babi.

Kejahatan Terorganisir adalah kegiatan kriminal yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur hierarki, serta terorganisir dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal. Menurut Hagan (2022), kejahatan terorganisir berbeda dengan kejahatan biasa karena memiliki organisasi yang tersusun rapi, memiliki hierarki yang jelas, dan seringkali melibatkan strategi untuk menghindari penegakan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Abadinsky (2021), kelompok kejahatan terorganisir sering menggunakan suap dan ancaman untuk memperoleh dukungan dari pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga mempermudah kegiatan mereka dalam penangkapan dan perdagangan fauna langka.

Perdagangan fauna langka adalah aktivitas jual beli, pertukaran, atau perpindahan spesies hewan yang terancam punah atau memiliki populasi yang terbatas di alam liar. Perdagangan ini dapat bersifat legal atau ilegal, tergantung pada regulasi yang berlaku di negara-negara

tertentu serta status konservasi spesies yang diperdagangkan. Banyak fauna langka diperdagangkan secara ilegal karena memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti untuk bahan obat, hiasan, atau sebagai hewan peliharaan eksotis (Roe, 2019). Sedangkan menurut UNODC, 2020 Perdagangan fauna langka memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup spesies tertentu.

Aktivitas ini seringkali mengakibatkan penurunan populasi di habitat aslinya dan berisiko menyebabkan kepunahan jika tidak dikontrol dengan baik. Sama halnya dengan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2022) banyak spesies satwa liar, seperti harimau, badak, dan gajah, terancam punah karena perburuan dan perdagangan ilegal. Kemudian juga dipertegas oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 2020) Perdagangan fauna langka memberikan dampak serius terhadap keanekaragaman hayati. Menurut BKSDA, kegiatan ini menyebabkan penurunan populasi satwa-satwa langka di habitat alamnya, bahkan mengakibatkan beberapa spesies mengalami kepunahan lokal (BKSDA, 2020).

Perdagangan satwa liar ilegal ini merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang berfungsi sebagai kawasan hutan tropis dan paru-paru dunia. TNKS, yang mencakup Renah Pemetik di Kerinci, adalah salah satu kawasan konservasi penting yang menjadi habitat lebih dari 4.000 jenis flora dan 350 jenis fauna, termasuk spesies langka seperti harimau Sumatra sebagai top predator, trenggiling, dan kura-kura hidung babi. Keberadaan TNKS yang telah diakui sebagai World Heritage menuntut adanya upaya perlindungan maksimal terhadap satwa langka yang ada di dalamnya. Namun, permintaan pasar internasional terhadap satwa liar, baik untuk dijadikan peliharaan eksotis, obat tradisional, maupun produk mewah, mendorong peningkatan aktivitas perdagangan ilegal yang mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut (Shepherd et al., 2020). Kegiatan perdagangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga merugikan negara dari segi ekonomi serta mencederai reputasi Indonesia di mata internasional sebagai salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal, termasuk melalui penerapan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap fauna langka

melalui penegakan sanksi pidana yang lebih berat dan penguatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum (Thaharah, 2023). Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antar-instansi dan keterbatasan sumber daya untuk memantau perdagangan ilegal ini (Lee et al., 2005; Adhiasto et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis, yaitu “*teori deterrence*” dan “*teori collaborative governance*”. Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dalam mengatasi masalah penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia.

Teori Deterrence

Teori “*deterrence*” atau pencegahan menjelaskan bahwa pemberian hukuman yang tegas, berat, dan konsisten dapat mengurangi kecenderungan individu atau kelompok untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks perdagangan satwa liar, penerapan hukuman pidana yang berat dan denda ekonomi diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku (Thaharah, 2023). Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka mengatur hukuman penjara dan denda bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan ini, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat pelanggaran.

Teori Collaborative Governance

“*Collaborative governance*” adalah pendekatan yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan aktor internasional untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Dalam konteks perdagangan satwa liar di Indonesia, teori ini menyoroti perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk memperkuat penegakan hukum dan memantau aktivitas perdagangan lintas negara (Jiao et al., 2021). Implementasi “*collaborative governance*” diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai lembaga dan organisasi.

Efektivitas Teori Deterrence dalam Penerapan Sanksi Pidana

Berdasarkan teori “*deterrence*”, diharapkan bahwa sanksi pidana yang tegas akan mengurangi angka kejahatan perdagangan satwa liar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa

masih banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang sepadan karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya dalam sistem penegakan hukum (Lee et al., 2005).

Efektivitas Teori Collaborative Governance dalam Kerjasama Antar-Lembaga

Teori “*collaborative governance*” menyarankan bahwa kerjasama yang kuat antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar-lembaga di Indonesia masih sering mengalami kendala (Lubis, 2017; Broussard, 2017).

Kesenjangan utama yang ditemukan dalam literatur adalah adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang ada dan penerapannya di lapangan. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan peraturan lainnya telah diperkuat dengan sanksi yang lebih berat, efektivitas penegakannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pengawasan dan kurangnya kerjasama lintas sektor (lembaga) yang memadai. Selain itu, ada tantangan dalam menangani sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih integratif (Adhiasto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan hukum lingkungan dan hukum pidana dalam penanganan kejahatan terorganisir terkait perdagangan fauna langka dan penebangan kawasan secara ilegal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada realitas praktik penegakan hukum di lapangan, serta evaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan pengalaman langsung subjek penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparat penegak hukum, lembaga kerapatan Adat yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada konservasi satwa langka.

Sampel diambil secara purposive (sengaja), yaitu dengan memilih informan yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait kasus perdagangan satwa liar.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

“Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, tokoh adat, dan perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mendapatkan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam penanganan kasus perdagangan fauna langka serta pengalaman mereka dalam koordinasi antar-lembaga terkait konservasi. Teknik observasi dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas perdagangan satwa liar, seperti Renah Pemetik di Kerinci dan beberapa pos pengawasan di perbatasan, untuk memahami secara langsung proses penegakan hukum, penyitaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.”

Data dari hasil wawancara dan observasi ini kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi partisipatif di beberapa lokasi penting, seperti Renah Pemetik Kerinci, pos pengawasan di perbatasan, dan wilayah yang sering menjadi jalur perdagangan satwa liar dan penebangan kawasan hutan secara ilegal. Observasi ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kebijakan hukum diterapkan di lapangan, termasuk proses penyidikan, penyitaan, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum.

Analisis Dokumen

Data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi seperti laporan tahunan penegakan hukum, regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka dan hukum Lingkungan. Analisis ini membantu memahami dasar hukum yang digunakan serta implementasi kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan empiris ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kebijakan hukum pidana dan tantangan dalam penegakannya di lapangan, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan

efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan terorganisir dalam perdagangan fauna langka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku, efektivitas penerapannya di lapangan masih kurang memadai (Wawancara. 2024). “Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas penyidik dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan jaringan kejahatan lintas negara” (Wawancara. 2024). Banyak kasus perdagangan satwa liar berhenti pada tahap penyelidikan awal karena kurangnya bukti yang cukup untuk menuntut pelaku di pengadilan. Selain itu, koordinasi antar-lembaga seperti kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) masih belum optimal, sehingga menghambat proses penanganan kasus secara efektif (Adhiasto et al., 2023; Lee et al., 2005).

Sedangkan pada bagian diskusi dan wawancara, analisis menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan kapasitas penegakan hukum ini dapat diperbaiki melalui penerapan teori *‘collaborative governance’*.

Beberapa Masyarakat juga menerangkan bahwa :

“Terkadang terjadinya pembunuhan terhadap fauna langka seperti harimau, dikarenakan fauna tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat atau telah memasuki wilayah penduduk masyarakat” (Wawancara. 2024).

Lembaga Masyarakat juga menekankan :

“Kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat lokal (Lembaga Adat) dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal dan penebangan hutan secara liar” (Wawancara. 2024).

Maka, diharapkan adanya peran sentral dari pihak yang berwenang untuk memastikan fauna langka tersebut telah berada di habitat alaminya, sehingga tidak mengganggu aktifitas dan wilayah tempat tinggal masyarakat. Di samping itu diharapkan juga kepastian hukum

terhadap tempat tinggal penduduk masyarakat, sehingga penduduk masyarakat dapat menetap di tempat yang semestinya berdasarkan Undang-undang dan tidak membuka lahan secara ilegal apalagi di kawasan TNKS sebagai habitat alami ratusan fauna langka.

Implementasi mekanisme kolaboratif seperti pembentukan *task force* yang terintegrasi dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum dapat mengurangi hambatan dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar lintas negara. Selain itu, penerapan teori '*deterrence*' menunjukkan bahwa peningkatan kepastian hukum melalui penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten dapat memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku kejahatan (Jiao et al., 2021; Thaharah, 2023)."

Pembahasan

Pembahasan ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai kebijakan hukum lingkungan dan hukum pidana yang diterapkan untuk menanggulangi perdagangan fauna langka dan efektivitas penegakannya di Indonesia, dengan menggunakan teori *deterrence* dan *collaborative governance* sebagai kerangka analisis.

1. Definisi Kejahatan Tergorganisir dalam perdagangan fauna langka

Kejahatan Terorganisir

Kejahatan terorganisir dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur dan organisasi tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material, seringkali melalui kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perdagangan satwa langka (Ferna Lukmia, 2020; Yoshua et al., 2016). Aktivitas ini tidak hanya melibatkan pelaku di tingkat lokal tetapi juga mencakup jaringan internasional yang terkoordinasi untuk mempermudah operasinya dan menghindari deteksi penegak hukum (FATF/OECD, 2020).

Kejahatan terorganisir dalam konteks hukum lingkungan dan perlindungan fauna diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta dalam berbagai peraturan terkait hukum lingkungan. Menurut Pasal 21 dan 40 UU No. 5 Tahun 1990, kejahatan terorganisir mencakup tindakan seperti pengambilan, perdagangan, pengangkutan, dan pemanfaatan ilegal spesies satwa yang dilindungi. Tindakan-tindakan ini sering kali dilakukan oleh jaringan yang terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas, dari pemburu hingga pihak yang mengurus penyelundupan dan distribusi ke pasar internasional (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990). Dalam hal ini, tindakan-tindakan yang melanggar

undang-undang tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal tetapi juga memicu permasalahan lintas negara yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama internasional (FATF, 2020).

Sedangkan, menurut hukum lingkungan, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, kejahatan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan serius yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kerugian ekologi yang signifikan. (UU No. 32 Tahun 2009; FATF, 2020)

Fauna Langka

Fauna langka adalah spesies hewan yang populasinya sangat terbatas dan berada dalam risiko tinggi kepunahan, baik di habitat alami maupun secara global. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, fauna langka termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi karena jumlahnya yang sedikit dan habitatnya yang semakin terancam akibat ulah manusia seperti perburuan liar dan perusakan habitat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Pasal 5). Hukum ini bertujuan untuk memastikan pelestarian dan perlindungan hewan-hewan langka di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan, dengan mewajibkan konservasi terhadap habitat alaminya.

Sementara itu, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan fauna langka juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Undang-undang ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan serta menyebabkan penurunan populasi spesies yang terancam punah (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 59). Perlindungan ini mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak habitat fauna langka serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Jadi, dapat disimpulkan Kejahatan terorganisir dalam perdagangan fauna langka merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, baik di tingkat nasional maupun global. Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal yang terstruktur, mulai dari perburuan liar hingga penyelundupan dan penjualan ilegal di pasar internasional (Aristides Yoshua et al., 2016). Di Indonesia, upaya penanggulangan terhadap kejahatan ini diatur melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dan peningkatan kapasitas penegakan hukum (UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009).

2. Kajian atas Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir

Penerapan kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan efek jera *deterrence* kepada pelaku. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana yang diatur sudah cukup berat, tantangan utama terletak pada implementasinya. Banyak pelaku yang berhasil lolos dari jerat hukum karena kendala teknis dalam penyidikan dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jera yang diharapkan.

Teori *deterrence* yang menjadi dasar penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa hukuman yang berat tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan kepastian penegakan. Dengan kata lain, untuk memberikan efek jera yang nyata, diperlukan jaminan bahwa setiap pelanggaran pasti akan diadili dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, keterbatasan sumber daya dalam sistem penegakan hukum Indonesia masih menjadi penghambat utama dalam mencapai kepastian hukum ini.

3. Analisis atas Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar-Lembaga

“Koordinasi antar-lembaga masih kurang optimal karena perbedaan prioritas di antara lembaga terkait, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif dalam penanganan kasus perdagangan fauna langka. Meskipun ada upaya pembentukan *task force* khusus, implementasinya sering terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya keselarasan dalam prosedur operasional antar-lembaga. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan satwa liar sering kali berjalan lambat dan tidak konsisten.

Solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan memperkuat koordinasi melalui pembentukan pusat data bersama antar-lembaga yang mencakup kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta lembaga Masyarakat (Lembaga Adat). Selain itu, perlu adanya pelatihan terpadu untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran petugas terkait pentingnya koordinasi lintas sektor.

Pembentukan *task force* dengan wewenang yang lebih jelas dan harmonisasi prosedur kerja antar-lembaga juga dapat membantu mempercepat penanganan kasus dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak dengan efektif.”

4. Tantangan Penegakan Hukum dalam Menghadapi Sindikat Internasional

Penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan fauna langka yang melibatkan jaringan internasional memerlukan kebijakan hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga adaptif terhadap dinamika global. Kurangnya harmonisasi kebijakan hukum pidana dan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara-negara lain sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dalam kerjasama internasional, termasuk melalui perjanjian bilateral atau regional yang mengatur mekanisme ekstradisi dan penuntutan bersama bagi pelaku perdagangan lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional terkait perdagangan satwa liar perlu dioptimalkan untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi fauna langka yang terancam oleh jaringan sindikat lintas negara.

5. Penggunaan Teknologi dan Pengawasannya dalam Kebijakan Penegakan Hukum

Meskipun beberapa teknologi canggih telah mulai digunakan, kajian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam penegakan hukum masih menghadapi kendala infrastruktur dan keterbatasan anggaran. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam teknologi pemantauan yang lebih luas, seperti penggunaan sistem pelacakan elektronik di jalur-jalur perbatasan yang rawan penyelundupan satwa.

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum pidana jika diterapkan secara merata di seluruh wilayah yang rawan perdagangan satwa liar. Hal ini tidak hanya akan membantu mendeteksi pergerakan ilegal secara lebih cepat, tetapi juga mempercepat proses pengambilan tindakan oleh aparat penegak hukum.

Implikasi Temuan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan hukum pidana dan strategi penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir dalam perdagangan fauna langka di Indonesia :

1. Penguatan Implementasi Sanksi Pidana

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir dalam Perdagangan Fauna Langka dan penebangan kawasan secara ilegal dapat diproses hingga tahap penuntutan, dengan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera yang lebih efektif.

2. Optimalisasi Koordinasi Antar-Lembaga (Lembaga Adat)

Diperlukan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antar-lembaga Adat sebagai sesepuh yang paham terhadap berbagai sejarah di Indonesia serta sejarah kawasan-kawasan yang sulit dijangkau, termasuk dengan membentuk pusat data bersama untuk berbagi informasi terkait kasus-kasus perdagangan satwa liar.

3. Peningkatan Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional perlu diperkuat melalui perjanjian ekstradisi dan koordinasi penegakan hukum lintas batas dengan negara-negara di Asia Tenggara. Langkah ini penting untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan internasional.

4. Investasi dalam Teknologi Pemantauan

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk teknologi pemantauan, seperti sistem pelacakan elektronik, untuk memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan perdagangan satwa liar. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, kebijakan hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir dalam perdagangan fauna

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan jurnal ini menyoroti tantangan signifikan dalam penanganan perdagangan fauna langka ilegal di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-V/1999 tentang Penetapan

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Perdagangan fauna langka adalah ancaman serius yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, ekonomi, dan reputasi internasional Indonesia. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan konservasi lainnya, yang menjadi habitat penting bagi fauna langka seperti harimau Sumatra sebagai top predator dan kura-kura hidung babi, terancam oleh kegiatan ilegal yang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir, baik lokal maupun internasional.

Penegakan hukum dalam hal ini dihadapkan pada sejumlah kendala utama, termasuk kurangnya koordinasi antar-lembaga (seperti polisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam), keterbatasan sumber daya, serta kekurangan kapasitas aparat penegak hukum untuk menindak jaringan kejahatan yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, banyak pelanggar yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya bukti yang cukup untuk membawa kasus ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada, meskipun sudah diperkuat dengan sanksi berat, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera atau “*deterrence*” bagi para pelaku kejahatan.

Dalam konteks ini, jurnal ini menggunakan “*teori deterrence*” dan “*teori collaborative governance*” untuk menguraikan masalah dan menawarkan solusi. “*Teori deterrence*” menekankan pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas untuk mengurangi angka kejahatan, sementara “*teori collaborative governance*” menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga Adat, dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Jurnal ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah diperkuat, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan teknologi pemantauan, serta birokrasi yang rumit menghambat penegakan hukum yang optimal.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya melibatkan “masyarakat lokal” seperti Lembaga Kerapatan Adat dalam upaya konservasi fauna langka melalui pendekatan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam melindungi keanekaragaman hayati.

Secara keseluruhan, jurnal ini menawarkan pendekatan holistik untuk memerangi kejahatan terorganisir dalam perdagangan fauna langka di Indonesia. Dengan integrasi sanksi pidana yang lebih tegas, kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk melindungi kekayaan fauna Indonesia yang terancam punah..

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-V/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
- Adhiasto, D., Purwanto, S., & Setiyanto, A. (2023). *A criminal justice response to address the illegal trade of wildlife in Indonesia*. Jakarta: Center for Conservation Studies.
- Broussard, S. (2017). *Building an effective criminal justice response to wildlife trafficking in ASEAN*. *Journal of Southeast Asian Law*, 9(3), 245-267.
- Jiao, X., Wong, M., & Tan, L. (2021). *Strengthening international legal cooperation to combat illegal wildlife trade*. *Environmental Law Review*, 23(2), 178-195.
- Lee, J. S., Shepherd, C. R., & Nijman, V. (2005). *Wildlife trade and implications for law enforcement in Indonesia: A case study from North Sulawesi*. *Biodiversity Conservation*, 14(5), 1143-1159.
- Lubis, A. (2017). *Implementation of CITES in Gunung Leuser National Park, Indonesia*. *Conservation Policy Review*, 12(4), 378-391.
- Shepherd, C. R., Nijman, V., & Chng, S. C. (2020). *Illegal wildlife trade, seizures, and prosecutions: The case of pig-nosed turtles in Indonesia*. *Global Ecology and Conservation*, 18, e00626.
- Thaharah, R. (2023). *Criminal sanctions for unauthorized transportation of protected animals*. *Journal of Environmental Law and Policy*, 34(1), 98-112.
- Andini, P., & Purnaweni, H. (2019). *The pattern of cooperation in combating illegal trade of pangolins between the Indonesian Ministry of Environment and Wildlife Conservation Society*. *Journal of Conservation Partnerships*, 7(2), 152-164.
- Ntungfor, N. L., & Atanga, L. (2017). *The effectiveness of criminal law in the enforcement of wildlife law in Cameroon*. *African Journal of Legal Studies*, 10(2), 85-102.
- Sinaga, R., Lumban, T., & Siregar, A. (2022). *Comparison of wildlife trade law enforcement in Indonesia and the U.S*. *Comparative Environmental Law Journal*, 5(1), 120-135.

- Nurhidayah, L., & Alam, S. (2020). *Forest and biodiversity protection laws in Indonesia*. *Environmental Policy Journal*, 15(3), 287-306.
- Bouquelle, J., & Lavrysen, L. (2020). *EU action plan against wildlife trafficking: Recent Belgian criminal cases*. *European Journal of Environmental Law*, 14(2), 133-146.
- Challender, D., Harrop, S. R., & MacMillan, D. C. (2014). *Changing behavior to tackle the wildlife trade*. *Conservation Biology*, 28(3), 755-763.
- Manzi, F. (2020). *The correlation between illegal wildlife trade and illicit financial flows in Indonesia*. *Journal of Crime and Economics*, 17(2), 202-218.
- Linkie, M., Christie, S., & Lynam, A. J. (2015). *Safeguarding Sumatran tigers: Evaluating law enforcement patrols in Indonesia*. *Biological Conservation*, 184, 447-457.
- Holden, J., Yanuar, A., & Martyr, D. (2003). *Tapir Asia di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatra: bukti yang dikumpulkan melalui foto-jebakan*. *Oryx*, 37, 34 - 40. <https://doi.org/10.1017/S0030605303000097>
- Ege, G., Schloenhardt, A., & Schwarzenegger, C. (2020). *Perdagangan gelap satwa liar: perdagangan gelap satwa liar, bagian tubuh hewan, dan turunannya*. <https://doi.org/10.24921/2020.94115945>
- Salfutra, R. (2018). *Perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Berkelanjutan*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.188>
- Abadinsky, H. (2021). *Organized Crime*. Cengage Learning.
- Hagan, F. E. (2022). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Sage Publications.
- Roe, D. (2019). *Biodiversity and trade: Understanding the relationship between CITES and the CBD*. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 26(6), 538-545. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1658827>
- Yoshua, A., Purnomo, A., & Samekto, F. X. A. (2016). *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*. *Diponegoro Law Journal*, 4(5), 324-342.
- Ferna Lukmia. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Media Iuris*, 3(3), 319-342.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). World Wildlife Crime Report

2020: Trafficking in protected species. Vienna: UNODC. Retrieved from.

<https://www.unodc.org>

FATF/OECD. (2020). *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*. Financial Action

Task Force (FATF). Retrieved from www.fatf-gafi.org